

## METODOLOGI PEMERINGKATAN PEMERINTAH DAERAH (*MUNICIPAL RATING*)

### Pendahuluan

Pemeringkatan pemerintah daerah (*municipal rating*) adalah evaluasi independen terhadap kemampuan dan kemauan suatu pemerintah daerah atau pemerintah daerah (kota, kabupaten atau provinsi) dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu dan penuh. Peringkat ini mencerminkan opini dari lembaga pemeringkat mengenai risiko kredit dari pemerintah daerah dan juga utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tersebut.

### Fungsi *Municipal Rating*

- **Bagi Investor**
  - Memberikan informasi yang objektif dan independen mengenai risiko kredit suatu pemerintah daerah membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat.
- **Bagi Pemerintah Daerah**
  - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
  - Memberikan sinyal kepada pasar mengenai kondisi keuangan dan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban.
  - Membantu pemerintah daerah dalam mengakses sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih efisien.
- **Bagi Pasar Keuangan**
  - Meningkatkan efisiensi pasar dengan menyediakan informasi yang kredibel mengenai risiko kredit berbagai pemerintah daerah.
  - Memungkinkan investor untuk membandingkan dan memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka.

### Notasi Peringkat

PT Kredit Rating Indonesia menggunakan notasi peringkat "*ir*" untuk menunjukkan peringkat kredit suatu pemerintah daerah, dengan *ir*AAA sebagai peringkat tertinggi dan *ir*D sebagai peringkat terendah (*default*). Peringkat dapat dimodifikasi dengan tanda plus (+) atau minus (-) untuk menunjukkan posisi relatif di dalam kategori peringkat.

### Metodologi Pemeringkatan

Metodologi pemeringkatan pemerintah daerah oleh PT Kredit Rating Indonesia didasarkan pada analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Analisis ini mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

#### I. Kerangka Kelembagaan (*Institutional Framework*)

- **Kerangka Hukum dan Prediktabilitas**

Menilai sejauh mana sistem keuangan publik dan kerangka peraturan dapat diprediksi dan mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya dalam jangka panjang. Aspek ini mencakup analisis terhadap:

  - Evaluasi ketersediaan dan kelengkapan kerangka hukum dari pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah, termasuk penerbitan dan mekanisme pelunasan surat hutang.
  - Implementasi dukungan dan keterlibatan pemerintah pusat dalam mendukung pendapatan pemerintah daerah, termasuk penerapan kebijakan transfer ke daerah dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.
- **Keseimbangan Pendapatan dan Belanja**

Mengevaluasi apakah terdapat mekanisme yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, termasuk kebijakan pengelolaan defisit anggaran. Analisis ini mencakup:

  - Evaluasi terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dan mengendalikan belanja.
  - Analisis terhadap kebijakan pengelolaan defisit anggaran, termasuk penggunaan pembiayaan dan pengendalian tingkat utang.
  - Penilaian terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang.

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Menilai sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan keuangan dan kegiatannya, serta sejauh mana terdapat mekanisme akuntabilitas yang efektif. Aspek ini mencakup:

- Pengawasan terhadap kepatuhan pemda dalam implementasi kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- Ketersediaan dan kualitas laporan keuangan, termasuk tingkat detail, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.
- Adanya audit independen terhadap laporan keuangan dan tindak lanjut atas temuan audit.
- Keterbukaan informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan program pemerintah daerah.
- Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

## II. Profil Kredit Individu

### A. Faktor Risiko Kunci (*Key Risk Factors*)

#### 1. Risiko Pendapatan Daerah

##### 1.1. Ketahanan Pendapatan (*Revenue Robustness*)

Menilai stabilitas, pertumbuhan, dan prediktabilitas sumber-sumber pendapatan daerah. Analisis ini mencakup:

- Evaluasi terhadap diversifikasi sumber pendapatan dan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.
- Analisis terhadap basis pajak dan potensi pertumbuhannya.
- Penilaian terhadap dampak kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional terhadap pendapatan daerah.

##### 1.2. Fleksibilitas Pendapatan (*Revenue Adjustability*)

Mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan melalui penyesuaian tarif pajak, perluasan basis pajak, atau sumber pendapatan lainnya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi:

- Otonomi daerah dalam menetapkan dan memungut pajak dan retribusi.
- Kemampuan dan kemauan politik untuk meningkatkan pendapatan.
- Keterjangkauan kenaikan pajak bagi masyarakat dan dunia usaha.
- Adanya mekanisme transfer yang mendukung fleksibilitas pendapatan, seperti dana perimbangan atau skema insentif fiskal.

#### 2. Risiko Belanja Daerah

##### 2.1. Keberlanjutan Belanja Daerah (*Expenditure Sustainability*)

Menilai tingkat pertumbuhan belanja daerah dan kesinambungannya dengan pertumbuhan pendapatan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja selama siklus ekonomi. Analisis ini meliputi:

- Evaluasi terhadap struktur belanja daerah, termasuk proporsi belanja wajib dan belanja diskresioner.
- Analisis terhadap faktor-faktor pendorong pertumbuhan belanja, seperti pertumbuhan penduduk, inflasi, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
- Penilaian terhadap kemampuan daerah dalam mengelola belanja pada saat terjadi penurunan ekonomi atau pendapatan.

##### 2.2. Fleksibilitas Belanja Daerah (*Expenditure Adjustability*)

Mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi belanja daerah jika diperlukan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi:

- Proporsi belanja wajib dan belanja diskresioner.
- Fleksibilitas dalam manajemen pegawai, termasuk kemampuan untuk mengurangi jumlah pegawai atau menyesuaikan gaji dan tunjangan.
- Kemampuan untuk menunda atau membatalkan proyek-proyek belanja modal yang kurang prioritas.
- Dampak sosial dan politik dari pengurangan belanja daerah.

### 3. Risiko Utang dan Likuiditas

#### 3.1. Ketahanan Utang dan Likuiditas (*Liabilities and Liquidity Robustness*)

Menilai kualitas kerangka pengelolaan utang, risiko, dan likuiditas. Analisis ini mencakup:

- Evaluasi terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan utang daerah, termasuk keberadaan batasan pinjaman, kebijakan investasi, dan manajemen risiko keuangan.
- Penilaian terhadap struktur utang, termasuk proporsi utang jangka pendek dan panjang, jenis suku bunga, dan mata uang.
- Analisis terhadap risiko likuiditas, termasuk ketersediaan kas dan investasi jangka pendek, serta akses ke sumber-sumber likuiditas eksternal.

#### 3.2. Fleksibilitas Utang dan Likuiditas (*Liabilities and Liquidity Flexibility*)

Mengevaluasi akses pemerintah daerah terhadap sumber-sumber likuiditas, baik internal maupun eksternal, serta kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditas dan melunasi utang yang jatuh tempo. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi:

- Ketersediaan dana cadangan atau mekanisme pembiayaan darurat.
- Akses ke pasar modal dan fasilitas perbankan.
- Kemampuan dalam mengelola risiko pembiayaan kembali (*refinancing*).
- Dukungan likuiditas dari pemerintah pusat atau pihak lain.

### B. Penilaian Risiko dan Keberlanjutan Utang

#### • Profil Risiko

Menggabungkan penilaian terhadap Faktor Risiko Kunci (*Key Success Factors*) menjadi sebuah Profil Risiko yang komprehensif, mencerminkan tingkat risiko keseluruhan dari pemerintah daerah. Profil Risiko dapat berkisar dari "Sangat Rendah" hingga "Sangat Tinggi".

#### • Keberlanjutan Utang

Mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola beban utangnya dalam jangka panjang, dengan menggunakan berbagai rasio keuangan seperti:

- Beban Utang Ekonomi: Mengukur tingkat utang relatif terhadap ukuran ekonomi daerah.
- Rasio *Payback*: Menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya dari sumber daya yang dihasilkan sendiri.
- Cakupan Utang: Mengukur kemampuan arus kas operasional dalam menutupi beban bunga dan pokok utang.
- Beban Utang Fiskal: Menilai tingkat utang relatif terhadap pendapatan daerah.

#### • Skenario Pemingkatan

Melakukan analisis skenario untuk menilai dampak dari perubahan kondisi ekonomi atau keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan utang pemerintah daerah. Skenario ini dapat mencakup:

- Penurunan pendapatan akibat perlambatan ekonomi atau perubahan kebijakan fiskal.
- Kenaikan belanja akibat inflasi, bencana alam, atau kebutuhan pembangunan infrastruktur.
- Kenaikan beban bunga akibat perubahan suku bunga.
- Penurunan likuiditas akibat kesulitan akses ke pasar modal atau fasilitas perbankan.

### C. Profil Kredit Mandiri (*Standalone Credit Profile/SCP*)

#### • Penentuan SCP

Menggabungkan Profil Risiko dan penilaian Keberlanjutan Utang ke dalam matriks SCP untuk mendapatkan indikasi awal mengenai peringkat kredit mandiri pemerintah daerah tersebut.

#### • Analisis Komparatif (*Peer Analysis*)

Membandingkan pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah lain yang memiliki profil risiko dan tingkat keberlanjutan utang yang serupa untuk memastikan konsistensi peringkat.

#### D. Faktor-Faktor di Luar SCP

- **Dukungan Luar Biasa**  
Menilai potensi dukungan finansial dari pemerintah pusat atau pihak lain yang dapat meningkatkan peringkat kredit pemerintah daerah tersebut.
- **Risiko Asimetris**  
Menilai faktor-faktor risiko tambahan yang dapat mempengaruhi peringkat kredit secara negatif, seperti kualitas tata kelola, transparansi, dan risiko kontinjensi.

#### E. Penentuan Peringkat Akhir

- **Pembatasan Peringkat (*Rating Cap*)**  
Mempertimbangkan peringkat *sovereign* sebagai batas atas (*ceiling*) bagi peringkat kredit pemerintah daerah, kecuali dalam kondisi tertentu di mana pemerintah daerah tersebut memiliki otonomi fiskal dan kelembagaan yang sangat kuat.
- **Penyesuaian Peringkat**  
Melakukan penyesuaian peringkat berdasarkan faktor-faktor di luar SCP, seperti dukungan luar biasa atau risiko asimetris.
- **Peringkat Akhir**  
Menetapkan peringkat kredit akhir berdasarkan SCP dan faktor-faktor penyesuaian lainnya.